

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Hidayati Sania

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

ABSTRACT

The research aims to know partially and simultaneously the effect of the number of population, the gross domestic products and inflation toward local tax. Data collection in this research used secondary data. The population in this research amount 35 consist of 29 districts and 6 cities. Sample determination in this research use sample saturated which all population to be sample. The result of this research in the first hypothesis shows the number of population, the gross domestic products and inflation have effect simultaneously toward local tax with significance level of 0,000. The second hypothesis showed the number of population have effect partially toward local tax with significance on the level of 0,001. The third hypothesis showed the gross domestic products have effect partially toward local tax with significance on the level of 0,000. The fourth hypothesis showed inflation have no effect partially toward local tax with significance on the level of 0,915.

Keywords: *the number of Population, gross domestic products, inflation, local tax.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi perekonomian yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Untuk menghadapi situasi tersebut maka dilakukan upaya pembangunan yang lebih merata di masing-masing daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang menjadi salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional. Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengetahui segala potensi yang dapat menjadi kebutuhan daerahnya (Arianto : 2014).

Efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dengan

melihat kembali aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dalam menghadapi persaingan global dengan cara memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Menurut Tim Jurnal Otonomi Daerah (dalam Prasetyo dan Ngumar : 2017) Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi daerah yaitu menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan

memberikan pemahaman kepada investor, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran terutama bagi tenaga kerja lokal tanpa harus menghambat tenaga kerja lainnya, mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki pendapatan masyarakat yang berfokus pada UMKM lokal dan ikut mengendalikan inflasi lokal.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada tiap daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam rangka desentralisasi, penyerahan berbagai kewenangan tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom, setiap daerah kabupaten dan kotanya diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya sendiri agar tidak bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Sumber pembiayaan yang paling penting dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (Haniz dan Sasan : 2013).

Menurut Saputra (2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan keuangan asli daerah untuk melaksanakan program otonomi daerahnya, tinggi rendahnya pendapatan asli daerah di suatu daerah akan berpengaruh pada keberhasilan otonomi daerah tersebut. Selain itu dengan adanya pendapatan asli daerah, otonomi di suatu daerah dapat berjalan dengan optimal. Artinya semakin meningkat penerimaan di suatu daerah maka kemungkinan besar dapat mempercepat pembangunan di daerah tersebut dan dapat mensejahterakan penduduknya.

Beberapa komponen PAD adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Diantara komponen PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam rangka meningkatkan PAD (Kusuma : 2013).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang ada (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud (Sugianto, 2008 :1).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto : 2014).

Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Shiska dan Nizaruddin: 2009).

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi : 2014)

Meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus diimbangi dengan

ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus akan menyebabkan inflasi. Hal ini akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian dan dapat menurunkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Saputra, Sudjana dan Djudi : 2014). Melihat hal ini pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan perekonomian dengan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar penerimaan pajak daerah dapat optimal.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	7.819.097.466.000	8.213.117.977.920	105.04%
2015	10.512.318.175.000	9.090.677.397.011	86.48%
2016	10.922.525.225.000	9.672.518.189.424	88.56%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2016 (diolah).

Fenomena dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.1. Realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan, akan tetapi belum memenuhi target yang sudah direncanakan. Pada tahun 2016 ditetapkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 10.922.525.225.000 tetapi hanya terealisasi 88.56% yaitu sebanyak Rp 9.672.518.189.424. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah cenderung menurun serta belum adanya sanksi yang tegas bagi si penunggak pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari tahun 2003 sampai 2012 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak

daerah di kota Surabaya, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah apakah jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi

Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Inflasi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk mempengaruhi besarnya penerimaan pajak di suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula pajak daerah yang diterima. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk maka dapat berpotensi bertambahnya wajib pajak sehingga akan banyak penerimaan pajak daerah yang diterima. maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1. Diduga jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk mempengaruhi besarnya penerimaan pajak di suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula pajak daerah yang diterima. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk maka dapat berpotensi bertambahnya wajib pajak sehingga akan banyak penerimaan pajak daerah yang diterima. maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2. Diduga jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu faktor yang sangat jelas dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang tumbuh dan berkembang akan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Serta akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin besar juga sumber penerimaan pajak daerah tersebut. maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3. Diduga produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi juga sangat mempengaruhi pada penerimaan pajak daerah hal ini disebabkan jika terjadinya kenaikan pada harga barang-barang yang ada akan membuat nilai mata uang semakin menurun dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta dapat membuat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadinya turun (Saputra, Sudjana dan Djudi: 2014). maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3. Diduga inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah

METODE PENELITIAN

Pemilihan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggambarkan permasalahan dan dianalisis berupa angka mulai dari

pengumpulan data, penafsiran sampai mendapatkan hasilnya. Data kuantitatif diperlukan dalam penelitian untuk mengambil kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Penentuan lokasi penelitian harus sangat diperhatikan karena untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian terkait pengaruh Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah ini mengambil lokasi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 yang merupakan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi Konseptual

Definisi Konseptual bertujuan untuk memudahkan dalam menafsirkan teori dalam penelitian ini. Adapun beberapa definisi konseptual dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah adalah Jumlah keseluruhan iuran wajib

pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diterima oleh daerah tanpa mendapatkan imbalan, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk Pembangunan daerah (Siahaan 2013: 9).

Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi.

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. (Badan Pusat Statistik, 2017: 40)

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah/daerah dalam kurun waktu satu tahun (Badan Pusat Statistik, 2017: 2).

Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan barang tersebut bisa berimbas pada kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Saputra, Sudjana dan Djudi : 2014).

Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan petunjuk untuk mengetahui pengukuran suatu variabel. Berikut operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pajak Daerah (Y)	Total Penerimaan Pajak Daerah	Rasio
Jumlah Penduduk (X1)	Total Jumlah Penduduk	Rasio
Produk Domestik Regional Bruto (X2)	Total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku	Rasio
Inflasi (X3)	Tingkat Inflasi	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data atau dokumen yang didapat dari instansi atau lembaga terkait.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa dokumen maupun catatan, seperti dari laporan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, buletin, majalah yang sifatnya dokumentasi yang telah disusun dan dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik Pusat Jawa Tengah, buku, skripsi, tesis dan data penunjang lainnya.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk menggunakan cara-cara atau rumus tertentu dalam mengolah data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) karena program ini dapat mengolah data- data statistik secara tepat dan menghasilkan output yang berguna dalam pengambil keputusan.

HASIL

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov* dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tidak normal begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized
N	83
Normal Parameters, b Mean	,0000000
Std. Deviation	,29461002
Most Extreme Differences Absolute	,072
Positive	
Negative	,072
Test Statistic	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui nilai signifikan sebesar $0.200 > 0.05$. Hal ini berarti data regresi berdistribusi normal dan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) pada variabel independennya. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi gejala Multikolinieritas sebaliknya jika nilai

VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Ln_X1	,755	1,324
Ln_X2	,716	1,396
Ln_X3	,938	1,067

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk semua variabel independen yaitu Ln_X1, Ln_X2, dan Ln_X3 masing-masing memiliki angka tolerance di atas nilai 0.1 dan untuk VIF kurang dari nilai 10 sehingga model regresi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Run Test dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05 maka data regresi tidak terjadi autokorelasi begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Run Test Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Valuea	-,05327
Cases < Test Value	50
Cases >= Test	51
Value Total Cases	101
Number of Runs	58
Z	1,301
Asymp. Sig. (2-tailed)	,193

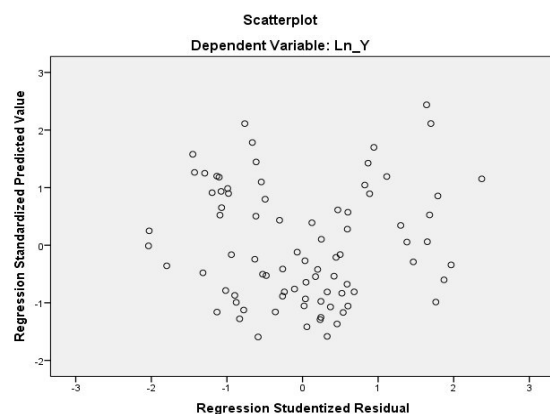
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.193 lebih besar dari 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 : 110)

Dasar pengujian dalam Uji Heteroskedastisitas adalah jika titik-titik pada pola membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit), maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-11,511	3,359	
Ln_X1	-.465	,139	-.261
Ln_X2	1,390	,125	,890
Ln_X3	-.007	,064	-.007

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk variabel independen X1 = -0,465, X2 = 1,390, X3 = -0,007 dengan konstanta -11,511. Sehingga diperoleh model persamaan regresi:

$$\text{Ln}_Y = -11,511 - 0,465 \text{Ln}_X1 + 1,390 \text{Ln}_X2 - 0,007 \text{Ln}_X3 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dijelaskan:

Nilai konstanta sebesar -11,511 artinya apabila semua variabel independen (Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi) tidak dimasukkan ke dalam model regresi maka nilai Pajak Daerah sebesar -11,511.

Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk adalah sebesar -0,465 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai Jumlah Penduduk

mengalami kenaikan 1 ribu jiwa maka nilai Pajak Daerah akan mengalami peningkatan sebesar -0,465.

Koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 1,390 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan 1 juta maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,390.

Koefisien variabel Inflasi adalah sebesar -0,007 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai Inflasi mengalami kenaikan 1% maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan sebesar -0,007.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2011 : 98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk mengetahuinya maka dilakukanlah pengujian dengan menggunakan metode *significance* pada level 0.05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji F (Simultan) ANOVAa

Model	F	
1 Regression	46,344	,000b

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Hipotesis Pertama: Pada output regresi menunjukkan bahwa variabel

jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji statistik F dan T dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya pada taraf kepercayaan 0,05 (Ghozali, 2011:98). Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a	
		t	Sig.
1	(Constant)	-3,427	,001
	Ln_X1		
	Ln_X2	-3,345	,001
	Ln_X3	11,124	,000
		-,107	,915

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Hipotesis Kedua: Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Jumlah Penduduk yaitu $0,001 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Jumlah Penduduk secara parsial yang signifikan terhadap Pajak Daerah.

Hipotesis Ketiga: Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto yaitu $0,000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto secara parsial yang signifikan terhadap Pajak Daerah.

Hipotesis Keempat : Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Inflasi yaitu $0,915 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak terdapat pengaruh inflasi secara parsial yang signifikan terhadap Pajak Daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghazali (2013: 95) Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 ^a	,638	,624	,30015

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diuraikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dalam penelitian ini variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan F test diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga Hipotesis diterima yang artinya penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dalam penelitian ini variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar

$0,001 < 0,05$ sehingga Hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh jumlah penduduk secara parsial yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Hariyuda (2009) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan syarat dalam pungutan pajak diantaranya harus adanya subjek pajak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah jumlah penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak.

Dilihat dari data penelitian jumlah penduduk sudah baik yang artinya

sebagai subjek pajak, maka penduduk akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pajak dan akan semakin banyak juga pajak daerah yang diterima oleh pemerintah.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dalam penelitian ini variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga Hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh produk domestik regional bruto secara parsial yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurrohman (2010) yang menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar nilai produk domestik regional bruto di suatu daerah maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat juga. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam membayar pajak.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dalam penelitian ini variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar

$0,915 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh

inflasi secara parsial yang signifikan terhadap Pajak Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Artinya ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa. Meskipun harga barang dan jasa naik karena inflasi yang membuat pendapatan mereka berkurang namun ini tidak berakibat pada penerimaan pajak daerah

Dilihat dari data penelitian angka inflasi juga didominasi dengan angka inflasi yang tidak maksimal, hal ini yang membuat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Untuk itu kepada para pemerintah daerah kabupaten maupun kota di provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperhatikan ketiga variabel tersebut di antaranya jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah di setiap daerah.

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Agar lebih signifikan, diharapkan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat memajukan kesejahteraan penduduk dengan mengurangi pengangguran agar masyarakat dapat lebih produktif dalam membayar pajak.

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Agar lebih signifikan perlu lebih ditingkatkan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto baik yang berhubungan langsung maupun tidak yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di Provinsi Jawa Tengah.

Inflasi berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Agar signifikan disarankan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk dapat menekan laju inflasi serendah-rendahnya.

Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6%

dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian ini. Diharapkan bagi peneliti yang akan datang untuk memperluas lagi variabel-variabel lain yang mempenga-

ruhi penerimaan pajak daerah dan melakukan olah data dengan metode analisa data yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Puspita Suci. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya”. *JIRA* Vol.3 No.1. 2014 hal 1-14.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Tegal 2010-2016*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017*.
- Encep Hardiana Rachman Nalendra. 2013. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)”. *Jurnal Ekonomi* Vol.1 No.3 2013 hal 1-12.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Haniz, Nadya Fazriana dan Hadi Sasana. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”. *Diponegoro Journal of Economics* Vol.3 No.1. 2013 hal: 1-13.
- Hasoloan, Jimmy. 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hariyuda, R. 2009. Analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak Daerah (studi kasus di kota kediri). Skripsi. *Universitas Brawijaya*. Malang
- Helti, Kristiana Advina. 2010. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. *Universitas Sebelas Maret*
- Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Putu Wirawati. 2013. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. *E-Journal Akuntansi* 2302-8556 Vol.2 No.1 2013 hal 574-585.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Prana, Riandani Rezki. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang Mampengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi”. *Jurnal Ilman* Vol.4 No.1 Hal 74-56.

- Prasetyo, Rudi dan Sujipto Ngumar. 2017. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2460 – 0585 Vol.3 No.2 2017 853-869
- Rahayu, Siti Kurnia.2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saputra, Andys Dwi, Nengah Sudjana dan Mochammad Djudi. 2014. "Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)". *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No.1 Desember 2014 hal 1-8.
- Shiska, Ery dan Abu Nizaruddin. 2010. "Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pdrb, Ekonomi, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kotapangkalpinang Tahun 2005-2009". *Journal of Accounting Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung* Vol.1 No.1 2010 Hal 55-65.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan retribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tamara, Arshad Darulmalshah. 2009. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung (1999-2008)". *Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Akuntansi* Vol 1, No 2. November 2009 hal 151-172.
- Triastuti, Dian dan Dudi Pratomo. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)". *e-Proceeding of Management* 2355-9357 Vol.3 No.1 April 2016 Hal 320-330.
- Utoyo, Bambang. 2009. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. Jakarta : PT. Pribumi mekar.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyu, Widayat. 2000. "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah". *Jurnal Perpajakan* Vol.10 No. 1 2016.
- Widjajanta, Bambang dan Aristanti Widyaningsih. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung : Citra Praya.